

PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA



# BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)



RANCANGAN  
AKHIR  
RENCANA  
KERJA  
(RENJA)  
TAHUN  
2023



Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan-Nya, Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Tak ada gading yang tak retak”, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam upaya tercapainya rencana kerja yang akuntabel dan transparan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

**Manado,     April 2023**

**KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**dr. JEMMY J.R. LAMPUS, M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19650122 199503 1 002**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ..	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	10
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	11
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5 Penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	14
<b>III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>16</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	17
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	19
<b>IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>27</b>
<b>V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1. Pengertian Ringkas tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana tahapan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Rancangan Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah Tahun 2023. Selanjutnya Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 memuat Program/Kegiatan Tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program indikatif dan prakiraan maju Tahun 2024.

#### **2. Proses Penyusunan Rencana Kerja**

Proses Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 yang memasuki Tahun ke – 2

Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang berperan pada RPJMD 2021 – 2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejalan dengan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

### **3. Keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Rencana Kerja Kementerian K/L dengan Rencana Kerja Provinsi Sulawesi Utara.**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021- 2016. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini akan menjadi bagian dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 selaras dengan Rencana Kerja Kementrian Dalam Negeri Khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Permendagri 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### **4. Tindak Lanjut Dengan Proses Penyusunan RAPBD**

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan selanjutnya berubah menjadi Dokumen Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Berbagai peraturan perundang-undangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan maupun Peraturan Daerah yang telah diterbitkan, diantaranya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentan Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-9889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tipe C.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembayaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta dengan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai Sumber Daya dalam pembangunan Daerah.

#### **b. Tujuan**

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rancangan operasional;
2. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penyelenggaraan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien sesuai dengan sasaran;
5. Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Guna pencapaian tujuan yang tercantum pada alinea sebelumnya maka Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penelitian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1       Latar Belakang
  - 1.2       Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  - 2.4 Riview terhadap rancangan awal RKPD
  - 2.5 Penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
    - a. Tujuan
    - b. Sasaran
  - 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 secara umum terealisasi dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut memiliki Pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 6.322.373.553,- untuk mendanai Program dan Kegiatan terkait Kelitbangan. karena kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulut untuk menanggulangi Pandemi Covid 19 maka refocusing anggaran Tahun 2020 Balitbangda menjadi Rp. 5.771.098.787 ,- berkurang Rp. 551.274.766,- .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja adalah 95,05% . Sedangkan untuk realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2021 sudah maksimal meskipun ada refocusing anggaran untuk kegiatan teknis yang berhubungan dengan Kelitbangan Utama. Capaian Kinerja Kelitbangan Pendukung dapat direalisasikan 100% yaitu Fasilitas Inovasi Daerah predikat Provinsi yang Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Type C Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi Kewenangan Daerah yang Ditugaskan kepada Daerah Provinsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Evaluasi

Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada Table T-C.29.

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.5.1..	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Cakupan Pelayanan Urusan Rutin Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	30%	30%
5.5.1.1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	3 Dok		3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	1 Dok	33.33 %
5.5.1.1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bln		12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	3 Bln	25%
5.5.1.1,03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD PD	1 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
5.5.1.1,05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bln		12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	3 Bln	25%
5.5.1.1,06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	12 Bln		12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	3 Bln	25%
5.5.1.1,07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100%		92%	92%	100%	100%	100%	100%
5.5.1.1,08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Jasa Penunjang PD	12 Bln		12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	3 Bln	25%
5.5.1.1,09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD	12 Bln		12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	3 Bln	25%
5.5.2..	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45%		40%	40%	100%	45%	0%	0%
5.5.2.1,01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	15 Dok		3 Dok	3 Dok	100%	15 Dok	0%	0%
5.5.2.1,02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen Kajian Bidang Sosial dan kependudukan;	11 Dok		6 Dok	6 Dok	100%	11 Dok	0%	0%
5.5.2.1,03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan;	13 Dok		6 Dok	6 Dok	100%	13 Dok	0%	0%
5.5.2.1,04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam inovasi dan teknologi daerah	33%		40%	40%	100%	33%	0%	0%

1. Realisasi program/kegiatan *yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran* yang telah direncanakan.

Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Tahun 2021 memiliki 2 Program dan 11 Kegiatan dan 27 sub kegiatan untuk mencapai target kinerja OPD dikarenakan Penanganan Pandemi Covid 19 maka Kegiatan strategis dikurangi menjadi 2 Program, 13 Kegiatan dan 23 Sub kegiatan. Terjadi pengurangan 4 Sub Kegiatan sehingga kami kurang mencapai target Indikator Kinerja secara maksimal.

2. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan Sebanyak 2 Program dan 11 Kegiatan dan 27 sub kegiatan yang kami laksanakan pada Tahun 2021 bisa direalisasikan dengan Baik dengan persentase Rata-rata 95,05% baik Operasional rutin kantor maupun kegiatan kelitbangan.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target hasil/ keluaran yang direncanakan Tahun 2020 Badan Penelitian dan pengembangan daerah tidak merealisasikan target yang melebihi target yang ingin di capai.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan terjalinnya kerjasama yang baik antara pimpinan dengan staf, serta terciptanya koordinasi dengan OPD dilingkup Balitbangda Kabupaten/Kota maupun dari Pemerintah Daerah, itu terbukti dengan capainya Indeks Inovasi Daerah dengan kategori Provinsi yang sangat Inovatif yang di berikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Faktor tidak tercapainya target kinerja yaitu persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dikarenakan refocusing anggaran dan sehingga belum bisa tercapai persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan OPD; Implikasi yang timbul dengan tercapainya target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu semakin meningkatnya Pelayanan Kepada masyarakat di Bidang Penelitian dan Inovasi.

6. Kebijakan /tindakan perencanaan dan pegagasan yang perlu di ambil dan mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Namun disisi lain terdapat factor penghambat yaitu adanya keterbatasan Sumber Dana dan Sarana Prasarana juga di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya tenaga Peneliti yang masih kurang untuk menunjang pelaksanaan Tugas kami.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Sesuai dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di yaitu melakukan fungsi Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung Yaitu Kelitbangan Utama : penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan Serta Kelitbangan Pendukung peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; fasilitasi inovasi daerah; pengembangan basis data kelitbangan; penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya :

Target Pelayanan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan daerah di Ambil dari Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan dan Persentase Fasilitasi Inovasi Daerah dengan perhitungan untuk Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbandan yaitu Jumlah Kelitbangan yang di tindaklanjuti di bagi Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah di Kali 100 persen dan untuk Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan rumus Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah total Perangkat Daerah di kali 100 persen.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menanggapi berbagai permasalahan yang dialami oleh Daerah Yaitu Penangan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah dengan melakukan Penelitian dan Kajian untuk menjawab Permasalahan permasalahan tersebut. Sehingga Balitbangda mengeluarkan Isu - isu Penting untuk Tahun 2023 yaitu :

- a. Pemulihan pendidikan/metode pembelajaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan.
- b. Pemulihan ekonomi kerakyatan pada era New Normal.
- c. Peningkatan Konektivitas untuk mendukung Kegiatan Ekonomi dan Pariwisata.
- d. Program kajian dan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah melalui fasilitas penerapan SiDa dan Fasilitas penilaian usulan inovasi daerah tahun 2021
- e. Percepatan Vaksinasi untuk mempercepat era Endemi Covid-19.
- f. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta Transformasi Digital

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dan dalam rangka mengawali program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan terdiri dari rencana Pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah( RKPD), Rencana Kerja (RENJA) OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 tentang Review RKPD tahun 2023.

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Utara.**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	05				5.580.005.840				5.803.206.074
5	05	01			5.080.005.840			100%	5.283.206.074
5	05	01	1,01		14.500.000	Transfer Pemerintah Pusat		2 Dok	15.080.000
5	05	01	1,01	01	8.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	8.320.000
5	05	01	1,01	06	6.500.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	6.760.000
5	05	01	1,02		4.454.615.840	Transfer Pemerintah Pusat		12 Bln	4.632.800.474
5	05	01	1,02	01	4.423.417.129	Transfer Pemerintah Pusat		12 Bln	4.600.353.814
5	05	01	1,02	03	25.750.000	Transfer Pemerintah Pusat		12 Bln	26.780.000
5	05	01	1,02	05	5.448.711	Transfer Pemerintah Pusat		1 Lap	5.666.659
5	05	01	1,03		10.300.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Lap	10.712.000
5	05	01	1,03	06	10.300.000	Transfer Pemerintah Pusat		12 Bln	10.712.000
5	05	01	1,05		5.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Keg	5.200.000
5	05	01	1,05	09	5.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Keg	5.200.000
5	05	01	1,06		71.070.000	Transfer Pemerintah Pusat		12 Bln	73.912.800

5	05	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Pendukung Kantor	Jl. 17 Agustus	12 Bln	12.360.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	12.854.400
5	05	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jl. 17 Agustus	12 Bln	12.360.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	12.854.400
5	05	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jl. 17 Agustus	12 Bln	15.450.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	16.068.000
5	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jl. 17 Agustus	12 Bln	30.900.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	32.136.000
5	05	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Kondisi Baik</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>100%</b>	<b>57.200.000</b>
5	05	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl. 17 Agustus	1 Paket	5.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	5.200.000
5	05	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung lainnya	Jl. 17 Agustus	1 Paket	50.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	52.000.000
5	05	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelayanan Jasa Penunjang PD</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>384.520.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>399.900.800</b>
5	05	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jl. 17 Agustus	12 Bln	15.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	15.600.000
5	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jl. 17 Agustus	12 Bln	77.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	80.080.000
5	05	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. 17 Agustus	12 Bln	292.520.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	304.220.800
5	05	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>85.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>88.400.000</b>
5	05	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jl. 17 Agustus	12 Bln	85.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	88.400.000
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah dokumen kajian penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>40%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>0,4</b>	<b>520.000.000</b>
5	05	02	1,01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	83.200.000
5	05	02	1,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	83.200.000
5	05	02	1,02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP);</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>1 Dok</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1 Dok</b>	<b>83.200.000</b>



						<b>Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)</b>								
5	05	02	1,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	<b>83.200.000</b>	
5	05	02	1,03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>3 Dok</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>3 Dok</b>	<b>218.400.000</b>	
5	05	02	1,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	<b>83.200.000</b>	
5	05	02	1,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	<b>83.200.000</b>	
5	05	02	1,03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	50.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	<b>52.000.000</b>	
5	05	02	1,04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Kajian Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>45%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>0,45</b>	<b>135.200.000</b>	
5	05	02	1,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pelaksanaan kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jl. 17 Agustus	1 Kajian	100.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Kajian	<b>104.000.000</b>	
5	05	02	1,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Implementasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jl. 17 Agustus	1 Keg	30.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Keg	<b>31.200.000</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>5.580.005.840</b>				<b>5.803.206.074</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 menindaklanjuti Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022

belum ada Usulan dari Pokir Dewan dan Masyarakat, dapat dilihat pada Tabel Tindak Lanjut Usulan Pokir 2023 dan Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Utara**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					Tidak Ada

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PD**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 Menindaklanjuti arah kebijakan Nasional adalah Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan Infrastruktur sehingga setiap kebijakan penelitian dan kajian mengacu pada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19.

Dalam menjujung tercapainya target RPJMD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang prioritas pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 dengan 9 agenda Prioritas Nawacita, melalui Peningkatan Kualitas dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasa, Penerapan, dan Pengoperasian serta Evaluasi Kebijakan. Kegiatan kelitbangan ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan. Kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di maksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penguatan kelembagaan penelitian dan pengembanganyang menjado kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 209 dan Pasal 219 Undang-undang No 23 Tahun 2014 sehingga kebijakan inovasi daerah sesuai pasal 388 Undang-undang

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka tugas pokok dan fungsi Balitbangda di perkuat dengan peraturan Gubernur No 84 Tahun 2016 dan dilengkapi dengan Permendagri No 17 tahun 2016.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023**

Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026 Yaitu ***"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gebang Indonesia ke Asia Pasifik"***

#### ***Misi :***

1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Didukung oleh sinergitas antar Daerah

#### ***Tujuan :***

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusiaya itu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter
2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
3. Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai

4. Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.
3. Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas.
4. Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan.
5. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Mengambil Misi yang ke-5 yaitu Pemerintahan yang baik dan bersih, didukung oleh sinergitas antar Daerah dengan menentukan Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut sebagai berikut :

**a. Tujuan**

1. Menyediakan sumber referensi dan rekomendasi penelitian dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan Daerah;
2. Menunjang Balitbang dalam proses penelitian dan Pengembangan yang berbasis Kelitbangan;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Reformasi Birokrasi Balitbangda Provinsi dan Kab/Kota Se-Sulut;
4. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Provinsi Sulawesi Utara berbasis Kelitbangan;
5. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan;
6. Tujuan pembinaan pelaksanaan dan pengembangan Inovasi Daerah.

**b. Sasaran**

1. Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya peningkatan peran serta sektor Penelitian dan Pengembangan yang optimal adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen sebagai referensi dan rekomendasi dari hasil kelitbangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang proses penelitian dan pengembangan;
- Terwujudnya Kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembag/instansi;
- Meningkatnya laporan kualitas kelitbangan;
- Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi;
- Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan Lingkup Pemerintah Daerah
- Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- Meningkatnya penerapan Inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Meningkatnya Kualitas Implementasi Daerah;

Tujuan dan sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertulis pada Bab sebelumnya. Untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka telah ditetapkan program yang meliputi bidang-bidang yang terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Sekretariat, Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dan Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan.

### **3.3. Program dan kegiatan**

- a. Faktor – Factor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan terhadap Program dan Kegiatan Tahun 2022 adalah berdasarkan dari visi dan misi Kepala Daerah seperti yang tertuang pada BAB II,

berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, Usulan dari Kabupaten Kota se Provinsi Sulut, Pokok pokok Pikiran DPRD Prov. Sulut dan Usulan Masyarakat

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut mengambil arah kebijakan untuk Tahun 2022 yaitu Kajian dan Penelitian untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi aparatur, pembangunan kesehatan dan infrastruktur.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan jumlah program dan jumlah kegiatan.

Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah kami usulkan pada Renja Tahun 2023 untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah adalah sebanyak 2 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 5.580.005.840,- dapat dilihat pada tabel T-C.33.

**Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan perkiraan maju atahun 2024**

**Nama Perangkat Darah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cat ata n Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.580.005.840				5.803.206.074			
5 0 5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Urusan Rutin Perangkat Daerah	Jl. 17 Agustus	100%	5.080.005.840			100%	5.283.206.074		
5 0 5	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jl. 17 Agustus	2 Dok	14.500.000	Transfer Pemerin tah Pusat		2 Dok	15.080.000	
5 0 5	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. 17 Agustus	1 Dok	8.000.000	Transfer Pemerin tah Pusat		1 Dok	8.320.000
5 0 5	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerin tah Pusat		1 Dok	0
5 0 5	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerin tah Pusat		1 Dok	0

5	0	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	6.500.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	6.760.000
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>1,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>4.454.615.840</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>4.632.800.474</b>
5	0	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jl. 17 Agustus	12 Bln	4.423.417.129	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	4.600.353.814
5	0	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jl. 17 Agustus	5 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	5 Dok	0
5	0	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	Jl. 17 Agustus	12 Bln	25.750.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	26.780.000
5	0	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jl. 17 Agustus	2 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Dok	0
5	0	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jl. 17 Agustus	1 Lap	5.448.711	Transfer Pemerintah Pusat	1 Lap	5.666.659
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>1,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan BMD PD</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>1 Lap</b>	<b>10.300.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1 Lap</b>	<b>10.712.000</b>
5	0	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jl. 17 Agustus	2 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Dok	0
5	0	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jl. 17 Agustus	2 Lap	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Lap	0
5	0	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jl. 17 Agustus	2 Lap	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Lap	0
5	0	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jl. 17 Agustus	2 Lap	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Lap	0
5	0	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Penatausahaan BMD PD	Jl. 17 Agustus	12 Bln	10.300.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	10.712.000
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>1,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>1 Keg</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1 Keg</b>	<b>5.200.000</b>
5	0	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jl. 17 Agustus	1 Unit	0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 Unit	0
5	0	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jl. 17 Agustus	1 Paket	0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	0



5	0	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jl. 17 Agustus	1 Keg	5.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 Keg	5.200.000
5	0	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jl. 17 Agustus	34 org	0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	34 org	0
5	0	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jl. 17 Agustus	35 org	0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	35 org	0
5	0	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>71.070.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>73.912.800</b>
5	0	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jl. 17 Agustus	1 Paket	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	0
5	0	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Pendukung Kantor	Jl. 17 Agustus	12 Bln	12.360.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	12.854.400
5	0	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Rumah Tangga	Jl. 17 Agustus	12 Bln	12.360.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	12.854.400
5	0	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jl. 17 Agustus	1 Paket	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	0
5	0	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jl. 17 Agustus	12 Bln	15.450.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	16.068.000
5	0	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jl. 17 Agustus	12 Bln	30.900.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	32.136.000
5	0	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Kondisi Baik</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>100%</b>	<b>57.200.000</b>
5	0	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jl. 17 Agustus	1 Unit	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Unit	0
5	0	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. 17 Agustus	1 Unit	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Unit	0
5	0	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl. 17 Agustus	1 Paket	5.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	5.200.000
5	0	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung lainnya	Jl. 17 Agustus	1 Paket	50.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Paket	52.000.000
5	0	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelayanan Jasa Penunjang PD</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>384.520.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>399.900.800</b>
5	0	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jl. 17 Agustus	12 Bln	15.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	15.600.000
5	0	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jl. 17 Agustus	12 Bln	77.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	80.080.000
5	0	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Jl. 17 Agustus	2 Lap	0	Transfer Pemerintah Pusat	2 Lap	0
5	0	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. 17 Agustus	12 Bln	292.520.000	Transfer Pemerintah Pusat	12 Bln	304.220.800
5	0	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>12 Bln</b>	<b>85.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>12 Bln</b>	<b>88.400.000</b>

5	0	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jl. 17 Agustus	2 Unit	85.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		2 Unit	88.400.000
5	0	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. 17 Agustus	1 Unit	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Unit	0
5	0	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. 17 Agustus	1 Unit	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Unit	0
5	0	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah dokumen kajian penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>40%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>40%</b>	<b>520.000.000</b>
5	0	02	1,01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>1 Dok</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>1 Dok</b>	<b>83.200.000</b>
5	0	02	1,01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	83.200.000
5	0	02	1,01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0
5	0	02	1,01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat		1 Dok	0

5	0	02	1,01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>1 Dok</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1 Dok</b>	<b>83.200.000</b>
5	0	02	1,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	83.200.000
5	0	02	1,02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0

5	0	02	1,02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>1,03</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>3 Dok</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3 Dok</b>	<b>218.400.000</b>
5	0	02	1,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	83.200.000
5	0	02	1,03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	80.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	83.200.000
5	0	02	1,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	50.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	52.000.000
5	0	02	1,03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0

5	0	02	1,03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Ringkasan Eksekutif (RE); Jumlah Dokumentasi Perpustakaan (DP); Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI)	Jl. 17 Agustus	1 Dok	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Dok	0
5	0	02	1,04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Kajian Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jl. 17 Agustus</b>	<b>45%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>45%</b>	<b>135.200.000</b>
5	0	02	1,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pelaksanaan kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jl. 17 Agustus	1 Kajian	100.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Kajian	104.000.000
5	0	02	1,04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase pelaksanaan kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jl. 17 Agustus	1 Kajian	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Kajian	0
5	0	02	1,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase Implementasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jl. 17 Agustus	1 Keg	0	Transfer Pemerintah Pusat	1 Keg	0
5	0	02	1,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Implementasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jl. 17 Agustus	1 Keg	30.000.000	Transfer Pemerintah Pusat	1 Keg	31.200.000
<b>TOTAL</b>									<b>5.580.005.840</b>			<b>5.803.206.074</b>

c. penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd.

Adapun Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPd Tahun 2023 tidak ada. Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023 sudah terakomodir dalam Usulan RKPd Tahun 2023 baik jenis Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pagu indikatif.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang dibahas pada Bab 3, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut.

Pembahasan substansi pada Bab 4 diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Perumusan Program dan Kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, Ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 mencakup 2 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang dianggarkan kegiatannya daari total 116 Sub kegiatan yang ada.

Matriks Rencana Program dan Kegiatan dan Perkiraan maju Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas pemerintah yang difungsikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Disadari bahwa laporan rencana kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, untuk itu kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan rencana kinerja kedepan sangat diharapkan.

Demikian laporan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 disampaikan sebagai wujud perencanaan program kinerja tahunan, semoga bermanfaat.

Manado, April 2022

#### **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**dr. JEMMY J.R. LAMPUS. M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19650122 199503 1 002**